

MITIGASI BENCANA KEBAKARAN KAWASAN PERKOTAAN

URBAN AREA FIRE DISASTER MITIGATION

Bambang Irawan*, Sarkani, Kus Indarto

Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

*Koresponden email: bambang.irawan@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Kota Bontang termasuk salah satu kota yang rawan kebakaran dan masuk dalam kategori tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Informannya adalah Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencegahan, Kepala Sekdi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan: (a) wawancara mendalam (*indepth interview*); (b) observasi; dan (c) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis model interaktif menurut Miles, Huberman dan Saldana, yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bontang telah dilakukan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dapat diketahui bahwa pengenalan dan pemantauan risiko bencana yang dilakukan telah berjalan dengan baik. Perencanaan partisipatif dalam penanggulangan bencana yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama dengan semua *stakeholder* yang ada di Bontang. Pengembangan budaya sadar bencana dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang dimulai dari usia dini. Upaya pengawasan dalam mitigasi bencana yang dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Faktor penghambat yaitu terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, terbatasnya tenaga inspektur kebakaran, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari atasan, tidak adanya Rencana Induk Proteksi Kebakaran yang memuat peta rawan kebakaran dan data wilayah manajemen kebakaran, tidak adanya standar *operating system* mitigasi kebakaran serta tempat penyuluhan yang tidak memadai. Implikasi dari penelitian ini adalah semakin menurunnya tingkat kerawanan kebakaran pemukiman di Kota Bontang.

Kata kunci: Bencana kebakaran, mitigasi, penanggulangan bencana, kebakaran pemukiman.

ABSTRACT

Bontang Municipality is one of the cities prone to fires and is included in the high category. The purpose of this study is to describe the fire disaster mitigation efforts carried out by the Bontang Municipality Fire and Rescue Service. This research uses a qualitative approach with a descriptive method. The key informant in this study was the Head of the Bontang Municipality Fire and Rescue Service. The informant was the Head of the Facilitation and Prevention Division and the Head of the Prevention and Community Empowerment Section. Data collection techniques were carried out by (a) in-depth interviews; (b) observation; and (c) documentation. According to Miles, Huberman, and Saldana, the data analysis technique used is an interactive model analysis technique consisting of data collection, condensation, data presentation, and drawing conclusions. This study concluded that the fire disaster mitigation efforts carried out by the Fire and Rescue Service in Bontang Municipality had been carried out well but could have been more optimal. The identification and monitoring of disaster risk that has been carried out has been going well. Participatory planning in disaster management is carried out by collaborating with all stakeholders in Bontang. A culture of disaster awareness is developed through education and training starting at an early age. Oversight efforts in disaster mitigation are carried out by regular monitoring and evaluation. Inhibiting factors are limited field extension staff, limited fire inspectors, lack of supervision and evaluation from superiors, absence of a Fire Protection Master Plan, which contains fire hazard maps and data on fire management areas, absence of a standard operating system for fire mitigation, and inadequate extension sites. The implication of this research is the decreasing level of vulnerability to residential fires in Bontang Municipality.

Keywords: Fire disaster, mitigation, disaster management, residential fires

PENDAHULUAN

Salah satu bencana yang masih sering terjadi dan dihadapi oleh masyarakat adalah bencana kebakaran yang merupakan salah satu bencana yang berdasarkan penyebab kejadiannya tergolong sebagai bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana non-alam yang di akibatkan oleh kelalaian manusia (*man-made disaster*). Jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup tinggi akan mempe-

ngaruhi keseimbangan kota. Pertumbuhan kota akan meningkatkan pertumbuhan perumahan di kota, mengakibatkan perkembangan permukiman yang semakin padat. Meningkatnya proporsi permukiman padat ini, telah berdampak pada peningkatan aktivitas masyarakat yang terkadang tidak selalu disertai dengan kepedulian akan pentingnya keamanan dan keselamatan dari ancaman bencana, salah satunya kebakaran. Untuk

mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menetapkan kebakaran sebagai salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

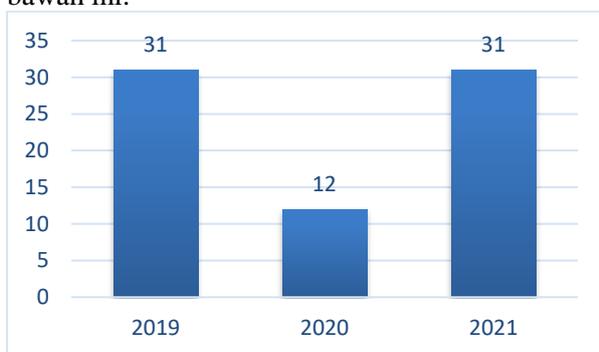
Tidak terlepas dari hal tersebut, Kota Bontang merupakan salah satu wilayah strategis nasional yang juga rawan terhadap bencana kebakaran. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2019 Kota Bontang masuk berada pada kategori tinggi dengan 150.00 urutan atau berada pada urutan 224 dalam Kabupaten/Kota di Indonesia, yang merupakan hasil perhitungan untuk multi ancaman dan diurutkan berdasarkan total skor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nilai Indeks Risiko Provinsi Kalimantan Timur (2015-2019)

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	KELAS RISIKO 2019
1	BERAU	202.40	202.40	202.40	202.40	202.40	TINGGI
2	PASER	196.40	196.40	196.40	196.40	196.40	TINGGI
3	KUTAI TIMUR	190.00	190.00	190.00	190.00	190.00	TINGGI
4	PENAJAM PASER UTARA	160.40	160.40	160.40	160.40	160.40	TINGGI
5	KUTAI BARAT	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	TINGGI
6	MAHAKAM ULU	156.40	156.40	156.40	156.40	156.40	TINGGI
7	KOTA BONTANG	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	TINGGI
8	KUTAI KARTANEGERA	160.40	135.52	129.84	124.79	124.79	SEDANG
9	KOTA BALIKPAPAN	159.20	108.14	108.14	108.14	108.14	SEDANG
10	KOTA SAMARINDA	134.80	111.30	110.35	109.95	102.94	SEDANG

Sumber: IRBI (2019)

Sejalan dengan data tersebut, berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang, kejadian kebakaran di Kota Bontang dalam tiga tahun terakhir sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 1. Kejadian Kebarakaran Pemukiman dan Industri di Kota Bontang

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kerawanan terhadap bencana kebakaran pada kawasan perumahan dan industri di Kota Bontang masih cukup tinggi dan hal tersebut merupakan hal penting dan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bontang. Sebagai salah satu Kota dengan tingkat kerawanan yang tinggi terhadap kebakaran, sebenarnya upaya – upaya untuk pencegahan dan penanggulangan akibat dari bencana kebakaran tersebut telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang sejak tahun 2012 melalui Perda No. 4 Tahun 2012. Kemudian melalui Perwali No. 46 Tahun 2018, keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam memaksimalkan pelayanan tersebut dengan

membentuk OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Tidak hanya hal tersebut, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya pedoman yang digunakan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan menggunakan Permendagri No. 114 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota sebagai standar penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. Untuk mendukung hal tersebut juga diterbitkan Permendagri No. 122 Tahun 2018 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi secara optimal bagi Pemerintah Daerah. Kemudian penguatan kebijakan pemerintah terhadap penanggulangan bencana kebakaran diperkuat lagi dengan hadirnya Permendagri No. 16 tahun 2020 diatur Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provisi dan Kabupaten/Kota.

Peran penting Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menjadi sangat penting yaitu dalam melaksanakan urusan Pemerintah Kota dalam pencegahan, tanggap darurat, penanggulangan dan penyelamatan bencana kebakaran. Namun dengan melihat data tingkat kerawanan bencana kebakaran yang telah disajikan sebelumnya. Banyak pertanyaan yang timbul apa sebenarnya akar penyebab bencana tersebut. Namun upaya mitigasi yang banyak dipraktekkan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia adalah upaya untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh akibat dari bencana. Namun sejauh ini, berdasarkan kajian literatur yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa tidak efektifnya komponen mitigasi disebabkan oleh kuantitas dan kualitas komponen mitigasi bencana yang masih rendah/sedang. Komponen mitigasi struktural tersebut dapat berupa kualitas pasokan air, kuantitas hidran, termasuk perlengkapan pada pos pemadam yang belum mampu memenuhi kebutuhan kota. Sementara itu untuk komponen non struktural ditemukan bahwa masih minimnya informasi peta peringatan dini serta peta persebaran proteksi (Fauzi et al., 2021). Selain temuan tersebut karakteristik Kota Bontang sebagai wilayah pesisir dalam melakukan mitigasi memiliki tantangan tersendiri. Sebagai tinjauan literatur peneliti menemukan bahwa beberapa hal yang menjadi penghambat dalam upaya mitigasi kebakaran pemukiman padat penduduk di wilayah pesisir disebabkan oleh kapasitas alat pemadam belum memadai, kondisi lingkungan fisik rentan terjadi kebakaran, selain itu belum banyak masyarakat merenovasi bangunannya, belum ada rekonstruksi aksesibilitas kendaraan pemadam, terbatasnya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi, kerentanan sosial dan ekonomi (Jefesen, 2022).

Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Bontang selama ini telah melakukan beberapa kegiatan pencegahan kebakaran yaitu Pertama, rutin guna memberikan edukasi terkait kiat – kiat pencegahan kebakaran, penanganan kebakaran ringan, pengenalan bahan-bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan kebakaran pada masyarakat tingkat kelurahan, perusahaan dan sekolah sekolah. Ke dua, melakukan pengecekan sistem proteksi kebakaran pada bangunan-bangunan baru seperti pengecekan sarana penyelamatan tangga darurat, ketersediaan APAR (alat pemadam api ringan) dan alarm kebakaran. Namun terdapat Kekurangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam melakukan pencegahan yaitu penyuluhan dilakukan terbatas pada lingkup padat penduduk diwilayah pemukiman darat sehingga kurangnya pencegahan pada wilayah pemukiman di atas air dan pencegahan kebakaran lahan, saat melakukan pengecekan kelayakan sistem proteksi kebakaran Dinas hanya melakukan *check list* kelayakan tanpa mengeluarkan surat rekomendasi bahwa bangunan tersebut memiliki sistem proteksi yang mumpuni sehingga dapat dijadikan rekomendasi sertifikat Layak fungsi. Dari segi kesiapsiagaan dan tanggap darurat petugas selalu *standby* di pos jaga untuk menunggu laporan kejadian melalui radio, telepon darurat dan *call center* 112, namun terkadang terjadi kendala pada jaringan radio yang terputus, jaringan *call center* 112 yang menggunakan *WiFi* terkadang jaringan *WiFi* mengalami gangguan sehingga laporan-laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan terhambat dan otomatis petugas juga terlambat melakukan penanganan. Karena setiap pos terbagi dalam beberapa regu kesiapsiagaan setiap regu juga berbeda jika sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap regu harus melakukan pengecekan setiap mobil pemadam dan peralatan pemadam, namun terkadang ada beberapa regu yang lalai dalam melakukan pengecekan sehingga harus dilakukan evaluasi bagi pimpinan untuk memberikan arahan ataupun teguran lebih lanjut kepada regu yang belum menjalankan kesiapsiagaan sesuai SOP. Karena akan berdampak pada saat penanganan kejadian kebakaran. Bagi regu yang lebih siap akan lebih cepat melakukan penanganan. Dampak dari regu yang tidak melakukan pengecekan rutin menyebabkan tidak terakomodirnya kerusakan-kerusakan yang ada seperti kerusakan peralatan dan mobil pemadam.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, pentingnya penelitian ini menjadi pertimbangan bahwa upaya pemerintah untuk melakukan upaya mitigasi dari usaha pencegahan, mitigasi kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang berkaitan dengan kejadian bencana melalui berbagai kebijakan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah, masih terdapat banyak kele-

mahan dalam pelaksanaannya. Sehingga diperlukan penelitian lebih dalam terhadap sejauhmana upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang yang akan diuraikan dalam penelitian ini, selain itu juga akan diuraikan tentang hal-hal apa saja yang menjadi penghambat dalam mitigasi tersebut.

Sudah ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran hutan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Maylani dan Mashur (2019) yang berjudul “*Collaborative Governance* dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut; Zulkarnaini dan As’ari (2019) yang berjudul “Diseminasi Peraturan Desa untuk Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut”; Yuliani (2018) yang berjudul “Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Pengendalian Hutan dan Lahan”. Dan Yuliani dan Sadad (2022) yang berjudul “Peran Aktor Kebijakan pada *Networking* Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan”. Kebaruan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian-penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan penelitiannya pada mitigasi kebakaran hutan dan lahan, termasuk di dalamnya lahan gambut, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan penelitiannya pada mitigasi bencana di Kota Bontang.

METODE

Penelitian ini berlokasi di Kota Bontang dengan lokus penelitian berada di Dinas Damkar dan Penyelamatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Fokus penelitiannya adalah, *pertama* upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bontang. *Ke dua*, faktor penghambat dan faktor pendukungnya. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *puposive sampling*. *Key informant* dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas DAMKAR Kota Bontang. Informannya adalah Kepala Bidang Fasilitasi dan Pencegahan, Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis model interaktif melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan dan Pemantauan Risiko Bencana

Terkait dengan manajemen penanggulangan bencana dalam UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana,

tanggap darurat, dan rehabilitasi. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa penanggulangan bencana sebagai sebuah rangkaian atau siklus. Lebih lanjut dalam UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 9 juga menyatakan bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Oleh sebab itu tugas dan fungsi utama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah melaksanakan perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan bidang kebakaran dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam upaya pengenalan dan pemantauan risiko terhadap bencana yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah: *Pertama*, dengan melakukan pembinaan aparatur petugas pemadam kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Pembinaan dilakukan dalam beberapa tahap yakni:

1. Pengenalan dasar penanganan kebakaran kepada petugas pemadam kebakaran yang baru direkrut, melalui pelatihan internal oleh inspektur pemadam kebakaran yang telah terlatih. Pelatihan dilakukan selama seminggu dengan pengenalan alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api, penyebab api, bahan yang digunakan untuk memadamkan api, pelatihan fisik dan praktek langsung sebelum petugas benar-benar melakukan penanganan di lapangan.
2. Pelatihan profesional di Lembaga Pusdiklat Jakarta dengan tingkatan Pemadam 1, Pemadam II, Pemadam III, Pelatihan Inspektur Kebakaran, Pelatihan Penyuluh dan Pelatihan Penyelamat/Rescuer. Saat ini telah terdapat 61 petugas pemadam kebakaran yang mendapatkan pelatihan Pemadam 1, dan kurang 87 petugas yang belum mendapatkan pelatihan tersebut. Namun, telah diupayakan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan untuk di anggarkan kembali pada tahun 2023 ini sehingga dapat mengirimkan petugas pemadam kebakaran yang belum pelatihan guna mengikuti diklat di Pusdiklat Jakarta.

Kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah Kota Bontang. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai program yang ditujukan kepada semua lapisan unsur masyarakat serta organisasi baik pendidikan, maupun dunia usaha/industri. Pelatihan dan sosialisasi yang dimaksud merupakan bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh profesional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Sebab yang diperbolehkan memberikan penyuluhan adalah petugas yang memiliki sertifikat penyuluh. Bentuk aksi pe-

nyuluhan yang telah dilakukan selama ini di antaranya sebagai berikut:

1. Pengenalan profesi pemadam kepada PAUD, TK dan SD yang dilaksanakan hampir setiap hari di kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan metode *Field Trip*.
2. di sektor Kesehatan rutin setiap tahun seperti yang telah dilaksanakan sebelumnya pada Puskesmas Bontang Selatan 1 dan 2, Puskesmas Bontang Utara 1, Puskesmas Bontang Lestari, Puskesmas Bontang Barat, RSUD Taman Husada dan RS. Amalia. Sosialisasi yang diberikan adalah terkait bagaimana tindakan awal ketika terjadi kebakaran pada tempat kerja, penggunaan APAR sebagai bentuk tindakan awal pemadam api, pemahaman terkait fasilitas pemadaman yang harus dimiliki terutama sebagai tempat fasilitas Kesehatan yang setiap hari banyak orang berkunjung.
3. Sektor Pendidikan yakni sekolah-sekolah beberapa diantaranya adalah SMKN 1, SMA 1, MAN, SMP dan SMA DHBS, SDN 001 BU, SDN 003 BU, SDN 003 BS. Bahkan damkar meluncurkan inovasi Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan Sekolah (SKKLS) dengan *pilot project* Yayasan Asyaumul.
4. Sektor Industri, Perbankan dan Dunia Usaha lainnya dengan pemberian Pelatihan Dasar kepada karyawan PT. Blackbear, Sertifikasi Kelas D K3 Karyawan KIE, Pelatihan Dasar dan simulasi PT. Graha Power Kaltim, Pelatihan dan Inspeksi PT. Energi Unggul Perkasa, PT. Kaltim Methanol Indonesia, Dealer Auto 2000 Cabang Bontang, Plaza Taman (Ramayana Bontang), Pelatihan Karyawan Kantor Pajak Pratama Bontang, PT. Kitadin Site Tandung Mayang, Bank Rakyat Indonesia Cab. Bontang, Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Negeri Bontang, dan Pegawai Badan Pusat Statistik Bontang.



Gambar 2. Kegiatan Pelatihan Bersama dengan Perusahaan

Dengan jumlah penduduk sebesar 186.137 (2022) dan luas wilayah 159.0303 (BPS, 2023) tentunya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memerlukan cara atau strategi yang memadai untuk dapat terus secara berkala dalam melakukan pengenalan dan pemantauan terhadap resiko bencana yang ada di Kota Bontang. Oleh sebab itu dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang berkembang saat ini, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan penyebaran informasi dalam rangka sosialisasi terhadap pengenalan dan pemantauan terhadap risiko bencana kebakaran kepada masyarakat melalui media sosial Instagram serta Facebook. Selain itu juga menggunakan media lain, yaitu media vidiotron yang berada pada lokasi strategis yang dengan mudah ditemui masyarakat di sekitar wilayah mereka.

Ketiga, Inspeksi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran bangunan gedung di Kota Bontang. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kebakaran skala besar. Mengingat bangunan gedung yang besar dengan alat proteksi kebakaran yang tidak memadai jika terbakar akan berisiko mengalami kebakaran dalam skala besar. Sehingga dapat menyebabkan kerugian materi bagi masyarakat sekitar yang terkena dampaknya. Ketika inspeksi, seorang inspektur akan melakukan pengecekan secara detail dan terperinci kemudian memberikan info kepada pemilik atau pengelola gedung bahwa gedung tersebut telah memiliki peralatan kebakaran yang memadai atau tidak.

Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa upaya mitigasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah melakukan upaya pengenalan dan pemantauan terhadap risiko bencana kepada masyarakat di Kota Bontang. Hal ini adalah merupakan program untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan upaya preventif dan strategis dalam rangka mengurangi dampak jika terjadi bencana kebakaran di wilayah Kota Bontang. Berdasarkan berbagai informasi yang didapat peneliti, dapat diketahui bahwa dalam upaya pengenalan dan pemantauan risiko bencana yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah dengan melakukan pembinaan aparatur Damkar dan sosialisasi terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta inspeksi dan pemeriksaan alat proteksi kebakaran. Selain hal tersebut Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melakukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dengan berbagai program yang ditujukan kepada semua lapisan unsur masyarakat serta organisasi baik pendidikan, maupun dunia usaha/industri. Bahkan sosialisasi juga dilakukan melalui berbagai media elektronik dan media sosial.

Perencanaan Partisipatif dalam Penanggulangan Bencana

Pada aspek perencanaan partisipatif hal yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan adalah dengan melibatkan organisasi perangkat daerah lain dan perusahaan swasta yang ada di Kota Bontang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penanggulangan bencana, sebagai bentuk upaya penanggulangan bencana. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 24 tahun 2007 Pasal 1 ayat 9 bahwa mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Menurut Endah (2019) perencanaan partisipatif kini menjadi salah satu pendekatan yang populer di kalangan masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir banyak berbagai *campaign*, *research*, dan berbagai proyek pemerintah mengklaim dirinya menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif dalam proses pembuatannya. Perencanaan partisipatif adalah sebuah pendekatan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait urusan-urusan publik agar keputusan yang diambil memiliki dasar informasi yang mendekati sempurna (*Quasi-Perfect Information*) dengan tingkat penerimaan masyarakat yang tinggi.

Bentuk kerjasama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama perusahaan sebagai contoh PT. Pupuk Kaltim melakukan sosialisasi bersama kepada anak-anak usia dini dengan memperkenalkan upaya pencegahan kebakaran sesuai usia mereka tentunya. Informasi bagi anak – anak usia dini dianggap penting, sebab tidak menutup kemungkinan jika mereka terjebak kebakaran dan tidak tahu apa yang harus dilakukan atau mereka melihat binatang berbahaya di area sekolah atau tempat bermain mereka setidaknya memiliki pengetahuan untuk memberikan pengaduan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Sejak dini anak-anak perlu untuk diberikan informasi saluran telepon darurat yang dapat mereka hubungi, di mana Kota Bontang memiliki saluran telepon darurat 112 yang terhubung pada 15 Dinas dengan *customer service* yang siap 1x24 jam memberikan pelayanan dan menerima pengaduan, dan akan diteruskan pada instansi terkait sesuai dengan pengaduan yang disampaikan.

Tidak hanya menjalin kerjasama dengan seluruh *stakeholder* dan perusahaan swasta yang berada di Kota Bontang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah membentuk Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang diresmikan pada tanggal 28 September 2022. REDKAR merupakan kepanjangan tangan dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mana ang-

gotanya berasal dari setiap keluarahan di Kota Bontang. Mereka dididik dan diberikan pelatihan guna memberikan informasi kepada masyarakat pada Kelurahan mereka masing-masing terkait edukasi pencegahan kebakaran dan hal-hal dasar yang perlu diketahui masyarakat agar tidak terjadi kebakaran terutama pada pemukiman padat penduduk.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam rangka perencanaan partisipatif terhadap penanggulangan bencana yaitu melalui kerjasama/kolaborasi dengan semua *stakeholder* yang ada di Bontang, baik masyarakat maupun korporasi yang beroperasi di wilayah Kota Bontang cukup berhasil dalam memberikan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dalam upaya untuk membangun partisipasi dan keterlibatan unsur korporasi/perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang melalui latihan bersama dengan berbagai instansi dan perusahaan swasta di Kota Bontang. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga berkoordinasi melalui forum Muspida, sehingga apabila terjadi bencana kebakaran akan secara otomatis menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing ketika terjadi musibah kebakaran. Hal ini sejalan dengan konsep administrasi negara yang dinyatakan oleh *Nigro and Nigro* dalam (RAHMAN, 2015) bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan. Selain itu juga proses administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini berbeda dengan Penelitian (Muthmainnah, 2022) penanggulangan bencana kebakaran permukiman di Kota Langsa Provinsi Aceh masih belum efektif dilihat kurangnya integrasi antar lembaga terkait penanggulangan bencana kebakaran, namun penelitian ini justru menemukan adanya sinergi yang baik antara semua komponen masyarakat/*stakeholder* dalam upaya mitigasi bencana yang ada di Kota Bontang.

Pengembangan Budaya Sadar Bencana Kebakaran

Upaya untuk melindungi warga negaranya terhadap bencana, Pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana. Melalui pendidikan diharapkan agar

upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat diperkenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik, dengan mengintegrasikan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum sekolah maupun ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.

Sejalan dengan hal tersebut pengembangan budaya sadar bencana di Kota Bontang yang merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan memberikan edukasi mitigasi bencana kebakaran dari usia dini bagi anak-anak PAUD, TK, SD, bagi anak sekolah tingkat SMP dan SMA telah diselenggarakan program dengan nama *Rescue Student*. Yang mana *Rescue Student* merupakan pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana di sekolah diartikan sebagai pemikiran dan upaya praktis untuk mengurangi atau menghilangkan segala bentuk risiko bencana dengan mengedepankan dan/atau mengutamakan proses pembelajaran atau kegiatan edukatif lainnya agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan budaya kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bahaya dari suatu bencana. Pendidikan bencana untuk semua kalangan termasuk anak-anak adalah suatu keharusan, karena anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama kejadian bencana, terutama yang sedang bersekolah pada saat berlangsungnya kejadian. Pada saat bencana, gedung sekolah hancur, mengurangi usia hidup murid sekolah dan guru yang sangat berharga dan terganggunya hak memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana. Berkaitan dengan budaya sadar bencana, ada temuan yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Muyasaroh dan Sudarmilah (2019), bahwa anak-anak bisa dikenalkan dengan game edukasi yang berkaitan dengan kebakaran. Judul penelitian mereka adalah “Game Edukasi Mitigasi Bencana Kebakaran Berbasis Android”. Tentunya ini akan menarik kalau bisa diadopsi dan diperkenalkan di Kota Bontang. Dengan demikian, anak-anak akan belajar mitigasi bencana kebakaran dengan sangat menyenangkan.

Selain itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang melakukan program edukasi kepada kelompok masyarakat (kader PKK), maupun instansi pemerintah (Puskesmas) termasuk perusahaan. Program ini dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pencegahan. Pendidikan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana atau lebih sering disebut sebagai Pendidikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan diharapkan agar upaya pengurangan risiko bencana dapat mencapai sasaran yang lebih luas dan dapat dikenalkan secara lebih dini kepada seluruh peserta didik/Pokmas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap kesiapsiagaan individu maupun

masyarakat terhadap bencana. PRB perlu dimasukkan ke dalam sektor pendidikan, di mana setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana sebagaimana perintah Undang-undang.

Melalui pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana baik secara formal dan non formal, upaya membangun budaya aman dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dapat terus dikembangkan. Dengan memiliki kesiapsiagaan menghadapi bencana diharapkan setiap orang mampu untuk mengurangi ancaman dan kerentanan dalam menghadapi bencana salah satunya melalui pengembangan budaya sadar bencana. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendidikan dan pelatihan dalam rangka membangun budaya sadar bencana di Kota Bontang oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan telah dilakukan dengan baik.

Identifikasi dan Pengenalan Terhadap Sumber Bahaya atau Ancaman Bencana Kebakaran

Dalam hal identifikasi dan pengenalan yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, diantaranya adalah kelemahan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka mengidentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud koordinasi kerja yang baik. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang terkait dengan penentuan wilayah manajemen kebakaran dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran yang tertuang dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dilakukan melalui Kerjasama dengan OPD terkait.

Lebih jauh terhadap upaya identifikasi serta pengenalan terhadap sumber bahaya yang ada di Kota Bontang, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang juga telah melakukan perluasan terhadap Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK), selain itu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga menjadi pusat informasi terhadap musibah kebakaran yang ada di lingkungan Kota Bontang. Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa indentifikasi terhadap sumber bahaya/rawan bencana kebakaran di-

lakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang dengan melakukan Kerjasama dengan OPD terkait yakni Bapelitbang, Kelurahan, BPBD hingga Ketua RT dalam melakukan pemantauan secara langsung terhadap titik rawan bencana kebakaran. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan menyempurnakan draft RISPK, penyempurnaan Peta Rawan Kebakaran serta Sistem Informasi Kebakaran pada tahun 2023.

Hal ini akan menjadi harapan atas kondisi wilayah Kota Bontang yang saat ini tingkat kerawanan terhadap bencana kebakaran pada kawasan perumahan dan industri di Kota Bontang masih cukup tinggi dan hal tersebut merupakan hal penting dan menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Bontang. Upaya untuk pencegahan dan penanggulangan akibat dari bencana kebakaran tersebut telah dilakukan melalui. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana, serta dikuatkan melalui regulasi daerah melalui Perda No. 4 Tahun 2012 dan melalui Perwali No. 46 Tahun 2018, keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam memaksimalkan upaya mitigasi terhadap bahaya bencana kebakaran di Kota Bontang.

Pengawasan Kegiatan Mitigasi Kebakaran

Dalam konsep manajemen kebencanaan, pengawasan merupakan kegiatan yang penting dalam rangkaian utuh dan menyeluruh atas kegiatan pencegahan/mitigasi terhadap bencana. Pengawasan merupakan salah satu kunci sukses dari upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tingkat keberhasilan dalam mencapai setiap tujuan yang telah direncanakan sangat dipengaruhi atas sejauh mana tingkat pengawasan yang dilakukan selama ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dalam mitigasi bencana yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang adalah dengan melakukan monitoring serta evaluasi secara berkala yakni 3 bulan sekali terhadap kegiatan pencegahan serta melakukan monitoring ketersediaan sarana dan prasarannya baik di Markas Komando maupun pada 5 Pos Jaga yang telah dimiliki Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bontang. Kurangnya pengawasan dari unsur pimpinan yang dikarenakan keterbatasan personil yang memiliki kompetensi memadai. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Jefesen, 2022) bahwa upaya mitigasi bencana dihambat oleh terbatasnya sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi.

KESIMPULAN

Upaya mitigasi bencana kebakaran yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kota Bontang telah dilakukan dengan baik namun belum optimal. Upaya mitigasi

yang dilakukan antara lain dengan melakukan: pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif dengan melakukan kerjasama/kolaborasi dengan semua stakeholder; pengembangan budaya sadar bencana; identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana kebakaran dengan melakukan Kerjasama dengan OPD terkait; pengawasan dalam mitigasi bencana. Faktor Penghambat upaya mitigasi bencana kebakaran di Kota Bontang adalah: terbatasnya tenaga penyuluh lapangan, terbatasnya tenaga inspektur kebakaran, kurangnya pengawasan dan evaluasi dari atasan, tidak adanya Rencana Induk Proteksi Kebakaran, tidak adanya SOP mitigasi kebakaran dan tempat penyuluhan yang tidak memadai. Sementara faktor pendukungnya adalah: kapasitas sumber daya manusia yang baik, sarana peralatan pendukung yang memadai dan adanya kolaborasi dengan Perusahaan. Dengan adanya mitigasi tersebut, maka diharapkan tingkat kerawanan kebakaran di Kota Bontang akan menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, S. S., & Arif, L. Mitigasi Bencana Banjir Secara Terpadu Dan Kolaboratif. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 267-276.
- Endah, S. (2019). *Perencanaan Partisipatif dan Perannya dalam Pembangunan*. <https://www.handaselaras.com/>.
- Fauzi, M., Miladan, N., & Utomo, R. P. (2021). Analisis efektivitas mitigasi bencana kebakaran di Kota Surakarta. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 16(2), 156–159.
- Jefesen, P. E. (2022). *Mitigasi Kebakaran Pemukiman Padat Penduduk Di Pesisir Pantai Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Maylani, Tri dan Mashur, Dadang. 2019. Collaborative Governance dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*. Vol.10, No.2:105-110.
- Mashur, D., & Zulkarnaini, Z. (2022). Analisis Prospektif Strategi Pengembangan Ekowisata Di Kawasan Pesisir Pantai I. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 39-44.
- Muthmainnah, S. (2022). *Efektivitas Penanggulangan Bencana Kebakaran Permukiman Di Kota Langsa Provinsi Aceh*.
- Muyasaroh, Siti Martatiani dan Sudarmilah, Endah. 2019. Game Edukasi Mitigasi Bencana Kebakaran Berbasis Android. *Jurnal PROtek*. Vol.6, No.1:31-35.
- Mustainah, M., & Royfandi, M. Problematika Dan Kesiapsiagaan Pemerintah Dalam Penanganan Bencana. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45-53.
- Rahman, B. (2015). Pentingnya Administrasi Publik Dalam Pembangunan. *Jurnal Akuntansi Dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 1(1), 151–160.
- Yuliani, F. (2018). Implementasi perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 37-44..
- Yuliani, F., & Sadad, A. (2022). Peran Aktor Kebijakan Pada Networking Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 317-322.
- Zulkarnaini, Z., & As' ari, H. (2019). Diseminasi peraturan Desa (perdes) untuk pencegahan Kebakaran Lahan Gambut. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 75-82.